BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian merupakan masalah yang tidak henti-hentinya dibicarakan dalam masyarakat termasuk penanggulangannya baik melalui media cetak maupun elektronika. Hal tersebut disebabkan pada prinsipnya perjudian itu dilarang baik melalui agama dan hukum, karena perjudian itu pada dasarnya dapat merusak moral, perekonomian masyarakat, bahkan dampaknya dapat menimbulkan kejahatan. Sedangkan di sisi lain, perjudian bisa mematikan kreativitas masyarakat, karena berangan-angan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Devis Septianto bahwa:

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang atau barang yang menang mendapat uang taruhan atau barang yang dipertaruhkan itu atau dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam pertarungan yang bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya.¹

Sedangkan menurut Kartini Kartono dalam Devis Septianto bahwa:

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.²

¹Devis Septianto, "Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sepak Bola Melalui Situs Online Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *1* *rsitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2016*, diakses melalui <https://www.googleusercontent.com/search?q=cache:mSXLcg8xCosJ:e-journal.uajy.ac.id/9097/+&cd=1&hl=en&ct=cink&gl=id>, tanggal akses 23 Januari 2020, hlm. 1.

²*Ibid.*

Berbagai jenis kejahatan yang menjadi penyakit sosial adalah perjudian. Akibat dari perbuatan itu akan menimbulkan beberapa kerugian baik itu kerugian pada diri sendiri maupun kerugian pada masyarakat.

Kerugian-kerugian yang diderita para pejudi itu sendiri antara lain:

1. Pekerjaan lain terbengkalai;
2. Keseimbangan rohani lama kelamaan akan menjadi berkurang, sehingga dengan demikian akan mudah terdorong untuk berbuat jahat.

Kerugian yang diderita masyarakat antara lain:

1. Keseimbangan keamanan dan ketertiban sering terganggu;
2. Merosotnya disiplin terhadap aturan-aturan masyarakat sehingga sering menimbulkan huru hara.³

Bila dilihat dalam prakteknya pada dasarnya akhir-akhir ini, masalah perjudian sudah sangat mencuat kepermukaan yang merupakan penyakit masyarakat penggemar perjudian. Bahkan kondisi ini tidak hanya melanda pada masyarakat yaitu orang dewasa, tetapi juga telah merambat prakteknya pada anak-anak dengan berbagai macam permainan seperti permainan remi, dadu, sampai dengan segala bentuk *sport game* dan lain sebagainya. Sekalipun perbuatan-perbuatan tersebut di atas itu dilarang oleh undang-undang dan aparat yang berwenang dengan wujud upaya preventif bukan berarti bahwa perjudian telah lenyap sama sekali, namun misalnya telah meresahkan masyarakat.

Hal ini senada dengan pendapat G.W. Bawengan bahwa: “Adalah suatu hal yang aneh bahwa terdapat sekian banyaknya masyarakat Indonesia yang anti judi, baik karena alasan praktis, namun di sana sini orang selalu menjumpai tempat-tempat perjudian yang diatur secara sembunyi-sembunyi ataupun berkedok seribu alasan”.⁴

Adapun tindak pidana perjudian ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis.

³G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 79.

⁴*Ibid*, hlm. 81.

Pada Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barang siapa dengan tidak berhak:
 1. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
 2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu.
 3. Turut main judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- (3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap pemain, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Diperhatikan pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, terlihat bahwa terhadap pelaku tindak pidana perjudian dikenakan ancaman hukuman pidana yang cukup berat, tetapi dalam kenyataannya masih banyak warga masyarakat yang bermain judi. Hal ini juga terjadi di wilayah hukum Kabupaten Tanjabbar, di mana kasus tindak pidana perjudian yang masuk di Polres Tanjabbar saja dalam tiga tahun belakangan ini. Berdasarkan kasus yang terjadi terdapat beberapa pelaku yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 11 (sebelas) orang, 5 (lima) di antaranya merupakan bandar judi, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel

Jumlah Kasus Perempuan Menjadi Bandar Judi Togel
di Kabupaten Tanjabbar Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Polresta Tanjabbar	Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal	Pengadilan Negeri Tanjabbar
1.	2018	6	2	2
2.	2019	3	2	2
3.	2020	2	1	1
Jumlah		11	5	5

Sumber Data: Polres Tanjabbar

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa dalam tiga tahun belakang ini, jumlah kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh perempuan masuk ke Polres Tanjabbar adalah sebanyak 11 (sebelas) kasus, dengan rincian 6 (enam) kasus tahun 2018, 3 (tiga) kasus tahun 2019 dan 2 (dua) kasus tahun 2020.

Biasanya permainan judi memang identik dengan laki-laki saja, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa permainan judi juga digemari oleh perempuan seperti judi togel. Seperti yang terjadi di Kabupaten Tanjabbar, berdasarkan observasi di Kabupaten Tanjabbar, 5 (lima) yang berperan sebagai bandar judi togel.

Pada observasi awal diketahui perempuan yang menjadi bandar judi togel ini berpenampilan biasa saja seperti ibu rumah tangga seharusnya. Berbeda dengan perempuan yang bermain judi jenis lainnya yang di identik dengan perempuan yang perokok dan berpenampilan seperti preman. Dilihat dari segi bicara para bandar judi togel ini biasa saja dan bicara penuh sopan santun. Biasanya mereka bermain di warung-warung karena hanya satu warung itu yang menjual angka kepada para ibu-ibu rumah tangga tersebut.

Aktifitas bandar judi togel yang dilakukan oleh perempuan di Kabupaten Tanjabbar sudah berlangsung sudah lama jadi bisa dibayangkan berapa banyak uang dipertaruhkan selama ini. Pada awalnya judi togel ini hanya diminati oleh laki-laki saja dan seiring perkembangan zaman judi juga diminati oleh kaum perempuan juga selain karena faktor hadiahnya sangat besar selain itu judi jenis ini mengalami perkembangan, dahulunya judi togel dilakukan secara langsung memasang angka kepada agennya tapi sekarang judi togel juga tersedia dengan bentuk online dan cara sms yang membuat siapa saja bisa dengan murah bermain judi togel, karena itulah permainan ini masih ada sampai sekarang.

Meskipun terhadap pelaku tindak pidana perjudian ini telah banyak tertangkap dan diancam hukuman pidana yang cukup berat, tetapi tetap saja kasus tindak pidana itu terjadi dan cenderung cukup banyak setiap tahunnya, hal ini sangat mungkin terjadi karena belum terlaksananya secara penuh upaya penanggulangan yang dilakukan.

Keterlibatan perempuan dalam judi jenis togel karena mereka menganggap judi jenis ini ialah permainan masyarakat semata. Walaupun mereka mengetahui bahwa permainan judi togel ini ialah suatu tindakan kriminal. Selain dari aspek sebagai mata pencaharian/pekerjaan karena mendapatkan keuntungan yang berkali lipat dari uang taruhan yang dipasang inilah faktor utama yang membuat orang menjadi bandar judi. Tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan diketahui bahwa perempuan yang terlibat sebagai bandar judi togel ini didorong dengan keuntungan yang banyak. Adapun faktor dari keterlibatan perempuan di dalam aktifitas judi togel ialah dari faktor internal dan faktor eksternal.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi berkenaan dengan penyebab terjadinya tindak pidana perjudian yang berjudul **“Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Perempuan Yang Menjadi Bandar Judi Togel Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah faktor penyebab perempuan yang menjadi bandar judi togel di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap perempuan yang menjadi bandar judi togel di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab perempuan yang menjadi bandar judi togel di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan terhadap perempuan yang menjadi bandar judi togel di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan di lapangan adalah berupa:

- a. Secara teoretis hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan serta menambah pengalaman penulis mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan perempuan yang menjadi bandar judi togel di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Secara praktis dapat mengetahui problema yang terjadi dalam faktor penyebab dan upaya penanggulangan perempuan yang menjadi bandar judi togel di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud judul skripsi ini haruslah diketahui pengertian dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain bahwa: "hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu"⁵. Adapun menurut Lukman

⁵J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 1487.

Ali bahwa: ” “yang menyebabkan”⁶. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa faktor penyebab merupakan (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.⁷

2. Upaya penanggulangan

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain bahwa: ”Penanggulangan adalah suatu usaha yang memerlukan proses, perbuatan, cara untuk menanggulangi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis dalam hal ini hukum pidana”.⁸

Upaya penanggulangan kejahatan yaitu: “segala suatu syarat untuk mencapai suatu maksud atau melakukan sesuatu untuk mencapai jalan serta mengisi yang akan terjadi, dengan melakukan sarana penal dan non penal”.⁹

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Barda Nawawi Arief mengemukakan:

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.¹⁰

Menurut G. P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penal diartikan sebagai: ”*Penal policy* merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana”.¹¹

⁶*Ibid.*, hlm. 1044.

⁷Anonim, *Bab II Kajian Teori*, <https://eprints.uny.ac.id/9331/3/bab%202-08208241006.pdf>, tanggal akses 29 September 2019.

⁸J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Op. Cit.*, hlm. 1006

⁹SR. Sianturi, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta, 1983, hlm. 215.

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 26.

¹¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu, Prenada, Media Group, Jakarta, 2008, hlm.1.

Penal policy merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa: “upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi”.¹²

3. Perempuan

Zaitunah Subhan mengemukakan:

Pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, yaitu orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Kata perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Pergeseran istilah dari perempuan ke wanita. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata Wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks.¹³

Tetapi dalam bahasa Inggris wan ditulis dengan kata *want*, atau *men* dalam bahasa Belanda, *wun* dan *schen* dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti *like, wish, desire, aim*. Kata *want* dalam bahasa Inggris bentuk lampayanya adalah *wanted* (dibutuhkan atau dicari). Jadi, wanita adalah *who is being wanted* (seseorang yang

¹²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 45.

¹³<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/56516/Chapter%20II.pdf?sequence=4>, tanggal akses 20 Juni 2020.

dibutuhkan) yaitu seseorang yang diingini. Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual dan mental lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.¹⁴

4. Tindak pidana perjudian

Adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barang siapa dengan tidak berhak :
 1. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
 2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu.
 3. Turut main judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- (3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap pemain, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

5. Bandar

Dina Ariyani sebagaimana dikutip oleh Devis Septiono yang mengemukakan bahwa:

Bandar adalah peran teratas dari jaringan dalam kegiatan judi togel, Adapun bandar melakukan koordinator peran dengan tugas yang berbeda-beda, tugas yang dimaksud adalah pembagian kerja. Peran mereka pun memiliki posisi atau kedudukan tersendiri di dalam jaringan judi togel, ada atasan dan ada bawahan. Di

¹⁴*Ibid.*

antaranya, Bandar wilayah, backing/keamanan, “karyawan” judi togel, pengepul nomor togel, dan pengecer nomor togel.¹⁵

6. Judi Togel

Menurut Kartini Kartono:

Jenis perjudian yang saat ini berkembang di masyarakat adalah Toto Gelap yang umum disebut sebagai togel. Judi togel merupakan suatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan hukum. Intinya judi togel adalah suatu perjudian yang menebak angka, jika angka yang dipesan itu berhadiah (tembus) maka dapat keuntungan, dilihat dari nominal uang yang dipasang angka tersebut.¹⁶

Berdasarkan pengertian beberapa istilah tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa maksud yang tergambar dari judul skripsi ini adalah faktor penyebab dan upaya penanggulangan perempuan yang menjadi bandar judi togel di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

E. Landasan Teoretis

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah teori kriminologi dan teori penanggulangan kejahatan. Teori-teori tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada ke dua rumusan masalah tersebut.

1. Teori penyebab kejahatan

Dalam kriminologi masalah sebab-sebab kejahatan merupakan suatu yang sangat menarik baik sebelum maupun sesudah kriminologi mengalami pertumbuhan dan perkembangan saat ini. Permasalahan kejahatan itu sendiri bukanlah semata-mata permasalahan abad teknologi modern. Meskipun perkembangan manusia sudah demikian

¹⁵Devis Septianto, *Op. Cit.*, hlm. 5.

¹⁶<http://master303.com/jenis-jenis-permainan-togel-online>. diakses 12 Juni 2021.

pesatnya dan maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan telah muncul banyak penemuan dan terobosan dalam berbagai ilmu pengetahuan, namun permasalahan kejahatan masih tetap merupakan permasalahan yang selalu bertambah.

Ilmu kriminologi banyak pendapat yang berbeda-beda mengenai sebab-sebab kejahatan. Seorang ahli kriminologi yang terkenal yakni Cesaro Lambroso berpendapat: “Seseorang menjadi jahat karena faktor bakat atau keturunan”.¹⁷

Dalam upaya menemukan sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan perlu dipertimbangkan hubungan antara perbuatan kejahatan dengan beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebabnya. Adapun sebab timbulnya suatu kejahatan menurut Romli Atmasasmita, yaitu antara lain:

1. Kejahatan bergantung pada diri manusia itu sendiri tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak luar yang mendorong seseorang untuk berbuat jahat
2. Kejahatan itu di luar kehendak sadar pelakunya
3. Kejahatan timbul karena manusia dianggap mempunyai kemampuan beralternatif dalam perbuatan yang menyenangkan atau berbuat yang dapat menimbulkan penderitaan.
4. Adanya faktor bakat yang terdapat dalam diri manusia.
5. Kejahatan timbul dalam diri seseorang atas dorongan dan keinginan untuk mendapat yang tidak dimiliki atau menambah apa yang telah dimilikinya.¹⁸

Perbuatan kejahatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya, yaitu korban kejahatan tersebut.¹⁹ Tindak pidana Pasal 23 Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia merupakan perilaku yang merugikan orang lain dan diri si pelaku serta mengganggu ketertiban, kedamaian dalam

¹⁷Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992, hlm. 61.

¹⁸Mulyana W Kusuma, *Kejahatan dan Penjahat*, Alumni, Bandung, hlm. 67.

¹⁹Lilik Purwastuti Yudaningsih, “Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”, *INOVATIF*, Volume 7 No 2, 2014, hlm. 93. Diakses melalui <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VPQpGicPQ2sJ:https://media.neliti.com/media/publications/43211-ID-pengaturan-tindak-pidana-inses-dalam-perspektif-kebijakan-hukum-pidana.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id>, tanggal akses 23 Agustus 2020.

masyarakat memang tidak patut dibiarkan begitu saja. Di samping itu perilaku yang demikian dapat mengganggu lancarnya roda pembangunan.

Mempelajari secara sistematis mengenai sebab musabab kejahatan adalah suatu hal yang baru, selama abad pertengahan dan awal zaman modern terdapat banyak teori, tetapi masih kacau dan samar-samar tentang sebab-sebab kejahatan.

Pendapat dari mazhab lingkungan memandang dari beberapa faktor lingkungan sebagai kejahatan seperti:

1. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan.
2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau teladan.
3. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan).
4. Lingkungan pergaulan yang berbeda (*differential association*).²⁰

W. A Bonger dengan penelitian-penelitiannya mengemukakan adanya 7 faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan:

1. Terlantarnya anak-anak.
2. Kesengsaraan.
3. Nafsu ingin memiliki.
4. Demoralisasi seksual.
5. Alkoholisme.
6. Kurangnya Peradaban.
7. Perang.²¹

Mengenai faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan di negara-negara yang berkembang, Walter Lunden mengemukakan beberapa gejala yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang yaitu:

1. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota yang jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.

59. ²⁰Ninik Widyanti, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.

²¹*Ibid.*

2. Terjadinya konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat terutama dikota besar.
3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang kuat pada pola kontrol sosial tradisional, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi samar pola untuk menentukan prilakunya.²²

Selain faktor lingkungan, banyak penyebab terjadinya kejahatan. Seperti yang terjadi pada saat ini di negara kita dikarenakan oleh faktor ekonomi masyarakat yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindak pidana. Bukan hanya itu sering dilihat dikoran-koran, televisi yang memberitakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana.

Setiap kejahatan atau tindak pidana yang terjadi tidak luput dari adanya faktor penyebab, diantaranya faktor ekonomi yang berupa:

1. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja illegal.
2. Terdapatnya bentuk-bentuk nilai-nilai sosial structural untuk mencapainya. Dalam masa kemudian ekonomi banyak warga masyarakat yang kurang kesempatan (mempunyai) kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial yang menjadi inovasi konvensional yang cenderung mengambil bentuk (tingkah laku) perbuatan yang melanggar hukum.
3. Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersebarnya kesempatan dalam sector-sektor ekonomi yang sah.
4. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan-hambatan atau ancaman terhadap tercapainya cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk perilaku yang agresif.
5. Pada kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi terdapat kemungkinan besar bagi perkembangan sub kebudayaan dilingkungan.
6. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran sejumlah masyarakat yang melanggar dan kehilangan penghasilan, cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menganggap pula dengan begitu lebih memungkinkan dirancang dan dilakukan suatu kejahatan.²³

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

²²Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahataj ioooon*, Sinar baru, Bandung, 1984, hlm. 170.

²³Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghaila Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 12.

Perilaku menyimpang tindak pidana Pasal 23 Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai tindakan kriminal memerlukan suatu perhatian khusus dalam pencegahannya, dalam upaya pencegahan dan pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara kebijakan penanggulangan kejahatan yaitu dengan kebijakan *penal* (hukum pidana) dan kebijakan *non penal* (di luar hukum pidana) atau lebih menitik beratkan pada pencegahan.

Upaya penanggulangan yang ditempuh terhadap tindak pidana adalah dengan 2 (dua) cara, yaitu:

Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- (1) preventif, upaya penanggulangan secara preventif dilakukan adalah dengan mengupayakan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengupayakan optimalisasi kegiatan intern pada institusi penegak hukum khususnya personil dan sarannya.
- (2) represif, penanggulangan secara represif dilakukan dengan memberikan tindakan kepada pelaku kejahatan sesuai hukum yang berlaku.²⁴

Menurut Usman yang mengemukakan bahwa: “Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa dari sekian banyak gagasan tentang strategi pemberantasan kejahatan, menunjukkan bahwa pendekatan penal (pemberian pidana bagi pelaku kejahatan) masih menjadi pilihan banyak negara di dunia”.²⁵

Menurut Sudarto dalam Barda Nawawi Arif, kebijakan hukum pidana adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan pada situasi suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁶

²⁴Hasanuddin, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian di Wilayah Hukum Polsekta Tamalanrea (Studi Kasus 2008-2012)*, Abstrak Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013.

²⁵Usman, “Analisis Perkembangan Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, hlm.2. Diakses melalui [Usman&middleName=&lastName=Fakultas%20Hukum%20Universitas %20Jambi&country=ID](https://www.google.com/search?q=Usman&middleName=&lastName=Fakultas%20Hukum%20Universitas%20Jambi&country=ID), tanggal akses 23 Januari 2020.

²⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet. 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 26.

Sedangkan menurut Hafrida bahwa: “definisi tersebut, suatu perbuatan yang dapat dikriminalisasi adalah suatu perbuatan yang menurut masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana”.²⁷

Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti mengemukakan, bahwa: “Dengan terpenuhi semua unsur tindak pidana, maka seseorang dapat dijatuhi suatu sanksi pidana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.²⁸

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti syarat dan daya guna.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana *non penal*. Pencegahan dan pengendalian kejahatan dengan upaya penal merupakan suatu usaha pencegahan dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksi yang berupa pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Akan tetapi hukum pidana itu sendiri memiliki keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan.

Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan ini sebagaimana diungkap oleh para sarjana antara lain

²⁷Hafrida, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana,” *PJIH* Volume 3 No.1,2016, hlm. 183. Diakses melalui <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zuy0SAAp2Z4J:jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9337+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id>, tanggal akses 23 Agustus 2020.

²⁸Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa Se Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* Volume 3 Nomor 2 Desember 2019, p-ISSN:2580-1120 e-ISSN:2580-2178 LPPM Universitas Jambi, diakses melalui <https://scholar.google.co.id/citations?user=cvtqBCgAAAAJ&hl=id>, tanggal akses 10 Agustus 2020.

1. Robin menyatakan, bahwa pemidanaan (apa pun hakekatnya, apakah dimaksud untuk menghukum atau memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan
2. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecendrungan-kecendrungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural besar dalam kehidupan masyarakat
3. Johannes Andenaes menyatakan, bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihart dari keseluruhan konteks kulturalnya, Ada saling pengaruh antara hukum antara faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita.
4. Donald R Taft dan Ralph W. England, menyatakan bahwa efektifitas hukum pidana tidak diukur secara akurat, hukum pidana hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana yang efisien dalam mengatur tingkah-laku manusia dari sanksi hukum.²⁹

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) ialah masalah:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada sipelanggar.

Keterbatasan dan kelemahan hukum pidana inilah penggunaan atau intervensi "*penal*" (hukum pidana) seyogianya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitif. Dengan kata lain sarana *penal* tidak selalu harus digunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan, untuk itu sarana *non penal* juga dapat diandalkan, dikembangkan dan dimanfaatkan.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

²⁹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 41.

Yang dijadikan lokasi penelitian adalah wilayah Kabupaten Tanjabbar yaitu di Polres Tanjabbar, Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal, Pengadilan Negeri Tanjabbar.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dipergunakan adalah berbentuk Deskriptif Analitis, yaitu memaparkan atau menggambarkan objek yang diteliti berkenaan dengan faktor penyebab dan upaya penanggulangan perempuan yang menjadi bandar judi togel di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian adalah bersifat Yuridis Empiris, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan faktor penyebab dan upaya penanggulangan perempuan yang menjadi bandar judi togel di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. Tata Cara Penarikan Sampel

Populasi yang dituju adalah Penyidik Polres Tanjabbar, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal, Hakim Pengadilan Negeri Tanjabbar dan perempuan yang menjadi bandar judi togel di Kabupaten Tanjabbar. Mengingat besarnya populasi tersebut, maka penulis melakukan penarikan sampel secara *Purposive Sampling* terhadap aparat penegak hukum yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tugas, jabatan dan kewenangan atau pengalaman mampu menjawab permasalahan yang penulis ajukan padanya dengan dibatasi sejumlah:

- a. 1 (satu) orang hakim Pengadilan Negeri Tanjabbar
- b. 1 (satu) orang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal.
- c. 1 (satu) orang Penyidik Polres Tanjabbar

Sedangkan terhadap perempuan yang menjadi bandar judi togel di Kabupaten Tanjabbar sebanyak 5 (lima) orang. Semuanya diambil sebagai sampel dengan cara *accidental sampling* yaitu: pengambilan sampel didasarkan pada kenyataan bahwa mereka kebetulan muncul.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian adalah:

a. Wawancara

Yaitu tanya jawab secara langsung kepada para responden yang telah ditentukan dengan dipandu oleh daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

b. Studi Dokumen

Dimaksudkan untuk mendapatkan data dengan mengadakan penelitian atau mencari berbagai dokumen yang ada kaitanya dengan masalah tindak pidana perjudian.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui para responden.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, meliputi:

(1) Bahan Hukum Primer

Yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan-bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

(3) Yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

7. Analisis Data

Dari data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, diseleksi dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan yang tidak mendasarkan pada perhitungan secara statistik atau matematis, melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang tertuang pada bab pembahasan skripsi nantinya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan terperinci mengenai seluruh isi dalam skripsi ini, maka penulis menyusunnya dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan landasan berfikir bagi bab-bab selanjutnya.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian Dan Upaya Penanggulangan Kejahatan. Dalam bab ini berisikan pengertian tindak pidana perjudian, unsur-unsur tindak pidana Perjudian dan faktor-faktor timbulnya tindak pidana perjudian, sanksi pidana perjudian serta penegakan hukum. Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab selanjutnya.

Bab III Faktor Penyebab dan upaya penanggulangan Perempuan yang menjadi Bandar Judi Togel Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang

berisikan tentang faktor penyebab perempuan yang menjadi bandar judi togel di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan upaya penanggulangan terhadap perempuan yang menjadi bandar judi togel di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bab ini berisikan uraian-uraian jawaban dari permasalahan yang timbul pada bab pendahuluan.

Bab IV Penutup. Berisikan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini dan saran yang diberikan oleh penulis dalam mengatasi kendala yang dihadapi.